



REFORM STAGNATION: UNDERSTANDING THE CURRENT SCOPE OF INDONESIA'S SECURITY SECTOR REFORM

Abstract. As a nation, after decades of finding its identity, 25 years ago, Indonesia conducted security sector reform (SSR) that sought to transform Indonesia from a militaristic-autocratic government to a democratic nation. As a concept, SSR sought to professionalize the armed forces into capable and professional fighting forces that were under and subjugated to civilian control. However, the latest research about the state of the Indonesia SSR, which was conducted many years ago, shows that the Indonesia SSR is incomplete and undergoing stagnation. Consequently, this research spotlights the gap that is present and thus tries to assess the determinant factor behind SSR stagnation through an in-depth qualitative study that employed semi-structured interviews with 4 participants acquired from various stakeholders involved in the decision-making process of the defense sector both from outside and inside of the government. Throughout this research, the researcher found various determinant factors that affected the results of the Indonesia SSR; however, because of the qualitative nature of this research that aims to gain an in-depth understanding regarding this issue, the researcher sought to discuss the most fundamental determinant factor which is civil society control itself. From this research, the researcher found that Indonesia's SSR achievement has improved in some parameters ever since 2006, although it was found that there was stagnation in some parameters and also a little setback in one aspect. Regarding the scope of civil society control, although there is a willingness of the government to establish transparency and accommodate civil society in the decision-making process of the defense sector, civil society access to information and space to collaborate is hampered by the secrecy factors of the defense sector that deemed necessary for the safety of the nation. However, with the presence of a democratic framework that is supported by free media and boosted through the internet, not only is the volume of civil society interested in the defense matter increasing, but it also finds its way to establish transparency and accommodate public interest in the defense sector policy's outcome.

Keywords : *Security Sector Reform, Civil Society Control, Qualitative Research, Thematic Analysis*

Sebagai sebuah bangsa, setelah puluhan tahun mencari identitasnya, 25 tahun yang lalu Indonesia melakukan reformasi sektor keamanan (SSR) yang bertujuan untuk mengubah Indonesia dari pemerintahan otoriter-militeristik menjadi sebuah negara demokratis. Sebagai sebuah konsep, SSR bertujuan untuk memprofesionalkan angkatan bersenjata menjadi kekuatan tempur yang mampu dan profesional yang berada di bawah dan tunduk pada kontrol sipil. Namun, penelitian terbaru tentang keadaan SSR Indonesia yang dilakukan bertahun-tahun yang lalu menunjukkan bahwa SSR Indonesia tidak lengkap dan mengalami stagnasi. Akibatnya, penelitian ini menyoroti kesenjangan yang ada dan dengan demikian mencoba menilai faktor penentu di balik stagnasi SSR melalui studi kualitatif mendalam yang menggunakan wawancara semi-terstruktur dengan 4 peserta yang diperoleh dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan sektor pertahanan baik dari luar maupun dalam pemerintah. Sepanjang penelitian ini, peneliti menemukan berbagai faktor penentu yang mempengaruhi hasil SSR



Indonesia. namun, karena sifat kualitatif dari penelitian ini yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai isu ini, peneliti berusaha untuk membahas faktor penentu yang paling mendasar yaitu kontrol masyarakat sipil itu sendiri. Dari penelitian ini, peneliti menemukan bahwa pencapaian SSR Indonesia telah meningkat dalam beberapa parameter sejak tahun 2006 meskipun ditemukan stagnasi dalam beberapa parameter dan juga sedikit kemunduran dalam satu aspek. Mengenai ruang lingkup kontrol masyarakat sipil, meskipun ada keinginan dari pemerintah untuk membangun transparansi dan mengakomodasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan di sektor pertahanan, akses masyarakat sipil terhadap informasi dan ruang untuk berkolaborasi terhambat oleh faktor kerahasiaan sektor pertahanan yang dianggap perlu untuk keamanan negara. Namun, dengan adanya kerangka demokrasi yang didukung oleh media bebas dan didorong melalui internet, tidak hanya volume masyarakat sipil yang tertarik pada masalah pertahanan yang meningkat, tetapi juga menemukan cara untuk menetapkan transparansi dan mengakomodasi kepentingan publik dalam hasil kebijakan sektor pertahanan.

Keywords : *Reformasi Sektor Keamanan, Kontrol Masyarakat Sipil, Penelitian Kualitatif, Analisis Tematik*